

OPTIMALISASI TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA BOS DI SD NEGERI JOGLO SURAKARTA TAHUN 2015/2016

Siti Supeni dan Yusuf
Dosen FKIP UNISRI Surakarta

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk: (1) Mendiskripsikan pelaksanaan program kegiatan sekolah Dasar (SD) terhadap pengelolaan BOS di SD Negeri Joglo Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. (2) Mengetahui optimalisasi partisipasi komite sekolah/masyarakat dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang memiliki peran paling penting dalam jenjang pendidikan dasar, melalui program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia pelaksanaan program wajib belajar, telah berjalan sejak tahun 2004 namun belum juga memadai sesuai dengan keinginan dan harapan kemajuan sekolah. (Irfan 8 Juni 2011). Metode penelitian dengan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2006: 295) teknik dan pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi mengenai *informant*, (*site inspection*), terdiri dari para anggota komite sekolah/orang tua/wali murid SD Negeri Joglo Kadipiro Banjarsari Surakarta dan *stake holders* terkait. Teknik pengumpulan data melalui: a. *Participant observation*); b. *Focus Group Discussion*, c. *n-depth interview*, d. *Documentary study*). Hasil penelitian berdasarkan survey dan wawancara mendalam secara bertahap di (SD) Joglo Kadipiro Kecamatan Banjarsari Surakarta yang dipimpin oleh kepala sekolah Kustinah, S.Pd, M.Pd, bahwa SD yang dipimpinnya dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses pendidikan dan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan sejumlah 477 siswa di SD Joglo Kadipiro, sejumlah 12 kelas paralel dari kelas 1a dan 1b sampai dengan kelas 6a dan 6b, belum cukup untuk memenuhi standart prasarana dan sarana sekolah tersebut, bila bergantung pada dana BOS dari pemerintah kota Surakarta, maka perlunya optimalisasi peran Komite Sekolah menggali usaha lain sesuai dengan Permendiknas No 37/2010 tentang Juknis Dana BOS 2011, bahwa sekolah harus mempublikasikan dana BOS yang dikelolanya.

Kata Kunci: Komite Sekolah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

A. PENDAHULUAN

Sekolah Dasar memiliki peran paling penting dalam jenjang pendidikan dasar, khususnya pada Sekolah Dasar (SD) menjadi landasan/dasar tempat untuk menempe generasi-generasi bangsa yang

diharapkan di kemudian hari akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk negara ini. Kebijakan wajib belajar 9 (Sembilan tahun) yang dikeluarkan pemerintah menjadi bukti akan adanya komitmen yang kuat dari

pemerintah untuk memajukan bangsa ini melalui sekolah-sekolah. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berjalan sejak tahun 2004 lalu dengan mekanisme penyaluran langsung dari pemerintah (pusat) ke masing-masing sekolah (SD dan SMP) seantero Indonesia. Pada tahun 2011.(Irfan 8 Juni 2011). Inspektorat akan turut serta mengawasi demikian juga BPK dan BPKP pasti akan melakukan pemeriksaan pula. Disamping itu, peran masyarakat mengawasi juga menjadi semakin mudah sebab besaran alokasi dana BOS masuk dalam dokumen APBD yang dapat diakses oleh publik. Pendidikan sekolah dasar (SD) sangat esensial bagi perkembangan anak dalam memfasilitasi perkembangan dan belajar anak sejak usia 6 tahun sampai 12 tahun melalui penyediaan berbagai sarana dan prasarana (fasilitas pendidikan), pengalaman dan rangsang yang bersifat mengembangkan, terpadu, dan menyeluruh sehingga anak (siswa) berkembang secara sehat,

dinamis dan optimal sesuai dengan visi dan misi sekolah dasar.

Sekolah belum transparan dalam pengelolaan dana BOS. Sebagaimana termaktub dalam UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi adalah termasuk dalam kategori badan publik yang memiliki kewajiban untuk mempublikasikan anggaran yang dikelolanya baik yang berasal dari APBD, APBN dan swadaya masyarakat. Sampai saat ini sekolah masih tertutup dalam hal tersebut. Dalam Permendiknas No 37/2010 tentang Juknis Dana BOS 2011 secara jelas menyebutkan bahwa sekolah harus mempublikasikan dana BOS yang dikelolanya beserta peruntukannya (RKAS). Namun pada kenyataannya sebagaimana terdapat temuan di lapangan sampai saat ini belum ada sekolah yang mempublikasikan RKAS-nya di papan informasi sekolah. (RokhmadMunawir Staf Program PATTIRO Surakarta, 16 Juli 2012)

Berdasarkan pra survey di sekolah dasar (SD) Joglo Kadipiro Kecamatan Banjarsari Surakarta tanggal 27 juli 2015, dengan ibu Niken Febrinakusuma,S.Pd, salah satu guru dan ibu Kustinah, S.Pd, selaku kepala sekolah, mengatakan bahwa SD yang dipimpinnya melakukan kegiatan yang

berkaitan dengan proses pendidikan dan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan sejumlah 477 siswa di SD Joglo Kadipiro, sejumlah 12 kelas paralel dari kelas 1a dan 1b sampai dengan kelas 6a dan 6b, belum cukup untuk memenuhi standart prasarana dan sarana di sekolah tersebut, bila bergantung pada dana BOS yang diterima dari pemerintah kota Surakarta, sangatdiperlukannya optimalisasi partisipasi masyarakat/komite sekolah terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri Joglo Kadipiro Banjarsari Surakarta untuk tahun ajaran 2015/2016, partisipasi masyarakat /komite sekolah agar lebih optimal.

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. (Soekidjo Notoatmodjo. 2003: 16). (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2002: 263). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan untuk operasional masing–masing sekolah dan tidak diberikan kepada masing–masing siswa. Besar biaya satuan BOS yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: SD/SDLB: Rp.580.000,00/siswa/ tahun. Pada Permendikbud RI No 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BOS dan Laporan Keuangan BOS tahun Anggaran 2012 Bab V halaman 17 s.d 22 sudah diatur penggunaan kegiatan yang boleh dibiayai dari Dana BOS dan larangan penggunaan Dana BOS.

Komite sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, 238

pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002). Peran Komite Sekolah sebagai berikut:(1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. (2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. (4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Tujuan Pembentukan Komite Sekolah adalah:(1)Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. (2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan

demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai tahun 2011 mengalami perubahan dari dana APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah. Mardiasmo (dalam Idhar Yahya, 2006: 28), akuntabilitas publik keuangan daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan daerah kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sehingga hak-hak public, yaitu hak untuk tau (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be kept information*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) dapat terpenuhi. Susanto, Widodo, Widyaningsih, (2011) dalam jurnalnya tentang Akuntabilitas Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sekolah Dasar Negeri Kota Semarang, mengatakan bahwa hasil penggunaan dana BOS di SDN di Kota Semarang sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan, namun ketentuan mengenai komponen yang boleh dan tidak boleh didanai oleh BOS tidak bisa dilaksanakan secara konsisten oleh sekolah.

Hal senada diperkuat penelitian yang dilakukan Wijaya, (2009) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan, studi ini 5 memberikan penjelasan bahwa, pada dasarnya setiap sekolah sudah menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan yang baik, tetapi kadar substansi pelaksanaannya beragam antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya.

Helkis (2009) dalam jurnalnya yang berjudul Efektifitas Penggunaan Dana Di MTS Negeri Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar menyebutkan bahwa sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana BOS yaitu, efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Katz dalam Idhar Yahya (2006:28), transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial dimana setiap warga Negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, KK, SAP (dalam Abdul Hafiz Tanjung, hal.3).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Luar Biasa.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh ketua peneliti adalah sebagai berikut: (1) Siti Supeni. 2013, Analisis Optimalisasi Faktor-faktor Sumber Belajar Terhadap Pendidikan Karakter Dengan Lingkungan dan Kearifan Lokal Sebagai Pemoderasi Pada Siswa

240

SMA/SMK Kabupaten Wonogiri. (2) Siti Supeni, 2013, Pengaruh Sumber Belajar Terhadap Pemahaman Pendidikan Karakter Mahasiswa FKIP Unisri, 2013, Strategi Pengembangan model Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas Sebagai Upaya Penguatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. (3) Siti Supeni, 2014, Pendidikan Karakter Melalui Pengembangan Rancangan Permainan Tradisional Sebagai Upaya Pelestarian Seni Budaya Kepada SD Di Kabupaten Wonogiri. Siti Supeni, 2014, Strategi Pengembangan model Pendidikan Karakter Dalam Menginternalisasikan Pendidikan Kewarganegaraan pada pendidikan SD Sebagai Penguatan Nilai-Nilai Karakter di Kota Surakarta. (4) Siti Supeni, (2014) Strategi Penanaman Pendidikan Karakter Dengan Melakukan Optimalisasi Program Parenting Pada Paud Di Kota Surakarta. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilakukan melalui pendidikan dalam keluarga (*informal education*), pendidikan di sekolah (*formal education*), dan pendidikan di masyarakat (*non formal education*), (5). Siti Supeni, (2015) Strategi Pengembangan Model Pembelajaran

Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016

Melalui Tembang Dolanan Jawa Sebagai Penguatan Nilai-nilai Pendidikan Karakter Pada Siswa Sekolah Dasar Bumi 2 No 205 Laweyan Di Surakarta.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menggambarkan Optimalisasi Tingkat Partisipasi Masyarakat/Komite Sekolah Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri Joglo Kadipiro Banjarsari Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar (SD) Negeri Joglo Kadipiro Banjarsari Surakarta. Model analisis interaktif (Miles & Huberman, 1992), membuat reduksi data dan sajian data secara terus menerus sampai tersusun suatu kesimpulan. Teknik analisa data menggunakan model analisis interaktif. Luaran Penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan untuk mewujukan data deskriptif tentang tingkat partisipasi masyarakat/komite sekolah terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri Joglo Kadipiro Banjarsari Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Manfaat yang lain adalah untuk memberikan masukan/laporan penelitian untuk mendapatkan

241

rekomendasi oleh Dewan Pendidikan Kota Surakarta (DPKS) guna “Mengetahui Optimalisasi Tingkat Partisipasi Masyarakat/Komite Sekolah Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Joglo Kadipiro Banjarsari Surakarta.

C. PEMBAHASAN

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya (*cost*) pendidikan tidak hanya dalam bentuk uang, barang maupun tenaga (yang dapat dihargakan dengan nilai uang).

Berdasarkan pra survey di sekolah dasar (SD) Joglo Kadipiro Kecamatan Banjarsari Surakarta tanggal 27 Agustus 2015, dengan ibu Niken Febrinakusuma, S.Pd salah satu guru dan ibu Kustinah, S.Pd, selaku kepala sekolah, mengatakan bahwa SD yang dipimpinnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses pendidikan dan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan sejumlah 477 siswa di SD Joglo Kadipiro, sejumlah 12 kelas paralel dari kelas 1a dan 1b sampai dengan kelas 6a dan 6b, belum cukup untuk memenuhi standart prasarana dan sarana di sekolah tersebut, bila

bergantung pada dana BOS yang diterima dari pemerintah kota Surakarta, sangat diperlukannya

optimalisasi partisipasi masyarakat/komite sekolah terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri Joglo Kadipiro Banjarsari Surakarta untuk tahun ajaran 2015/2016, partisipasi masyarakat/komite sekolah agar lebih optimal.

Dalam Permendiknas No 37/2010 tentang Juknis Dana BOS 2011 secara jelas menyebutkan bahwa sekolah harus mempublikasikan dana BOS yang dikelolanya beserta peruntukannya (RKAS). Namun pada kenyataannya sebagaimana terdapat temuan di lapangan sampai saat ini belum ada sekolah yang mempublikasikan RKAS-nya di papan informasi sekolah. Jangankan yang keseluruhan APBS atau RKAS beserta dana yang dihimpun dari orang tua siswa, untuk dana BOS saja tidak dipublikasikan, padahal peraturan perundangan secara jelas telah mengatur dan mewajibkannya, artinya sekolah perlu membuka diri, sekolah masih belum mau transparan secara optimal, hal ini perlu disadari mengingat banyak keperluan yang sangat mendesak dan belum diprogramkan dalam sekolah tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa tidak jauh berbeda dengan penelitian di SD Joglo Kadipiro Surakarta, bahwa kebiasaan yang dilakukan Sekolah seharusnya sekolah turut melibatkan peran Komite Sekolah, dalam menggali sumbangan dari orang tua siswa, namun kewajibannya juga harus dipenuhi. Sekolah perlu secara rutin rapat dengan komite sekolah dan tidak hanya menyelenggarakan setahun sekali rapat komite dalam tahun ajaran baru saja, namun juga perlunya pertemuan dengan para orang tua siswa per kelas secara rutin dalam mengambil tindakan apabila ada sekolah (kelas) memerlukan pantauan fasilitas yang lain guna terpenuhinya proses pembelajaran, masyarakat dalam hal ini orang tua siswa juga harus berani dan mampu mengungkapkan permasalahan yang terjadi di sekolah.

Pelaksanaan program kegiatan sekolah terhadap pengelolaan BOS di SD Negeri Joglo Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk BOS ini mencapai Rp 16.266.039.176.000,00 sejak tahun 2011. Jumlah dana BOS ini sesuai dengan Permendiknas 247/pk.p7/2010 tentang alokasi dana BOS per siswa per tahun dan

Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016

perjenjang pendidikan. Untuk siswa SD/SDLB di kota sebesar Rp 400 ribu, SD/SDLB di kabupaten Rp 397 ribu, SMP/SMPLB/SMPT di kota Rp 575 ribu, dan SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten Rp 570 ribu. Penyaluran dana BOS ini dilakukan dengan dilakukan melalui Bendahara Negara yang ditransfer lebih dahulu ke kas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baru diteruskan ke rekening sekolah. Mekanisme baru ini bertujuan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. Dengan cara itu, pengelolaan diharapkan pula menjadi lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan tak ada penyelewengan. Pembiayaan Pendidikan, bahwa sumber-sumber biaya pendidikan antara lain dari (1) Pemerintah seperti APBN dan APBD; (2) Sekolah (iuran siswa); (3) Masyarakat (sumbangan); (4) Dunia bisnis (perusahaan); dan (5) berasal dari Hibah. Namun yang didapat dari SD Negeri Joglo Kadipiro Banjarsari Surakarta setahun sekali dari APBN dan APBD pemerintah tingkat I Jawa Tengah dan APBD tingkat II melalui RPKS.

Tinjauan tentang Aliran Dana Bos Di SD N Joglo 76 Surakarta

Pencairan atau penyaluran Dana BOS dimulai Pada Tahun 2007 dilakukan secara triwulanan (tiga bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pencairan atau penyaluran Dana BOS Triwulan Pertama (Januari-Maret) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di bulan Januari 2015;
- b. Pencairan atau penyaluran Dana BOS Triwulan 2 atau Kedua (April-Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2015;
- c. Pencairan atau penyaluran Dana BOS Triwulan 3 atau Ketiga (Juli-September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2015;
- d. Pencairan atau penyaluran Dana BOS Triwulan 4 atau Keempat (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober 2015.

Alokasi dana BOS tiap sekolah untuk pencairan atau penyaluran dana BOS tahun 2015 tiap triwulan didasarkan data Dapodik. Adapun Dasar penetapan jumlah siswa penerima BOS adalah sebagai berikut:

- a. Triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodik tanggal 30 Nopember 2014;
- b. Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodik tanggal 15 Februari 2015;
- c. Triwulan 3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodik tanggal 15 Mei 2015;
- d. Triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodik tanggal 21 September 2015;

Sekolah setingkat SD dan SMP dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 akan diberikan dana BOS sebanyak 60 peserta didik. Kebijakan ini dimaksudkan agar sekolah kecil yang berada di daerah terpencil/terisolir atau di daerah tertentu yang keberadaannya sangat diperlukan masyarakat, tetap dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik.

Khususnya bagi SDN Joglo 76 tidak ada hambatan dalam penerimaan dana bos di SDN Joglo 76 Surakarta.

Penggunaan Dana BOS 13
Penggunaan Dana BOS: a. Pengembangan Perpustakaan, b. Kegiatan penerimaan peserta didik baru, c. Kegiatan Pembelajaran Dan Ekstra Kurikuler Peserta Didik, d. Kegiatan Ulangan dan Ujian e. Pembelian bahan-bahan habis
244

pakai, d. Langganan daya dan jasa, g. Perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah, h. pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, i. pengembangan profesi guru, j. membantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIP 2015, k. Pembiayaan Pengelolaan BOS, l. Pembelian dan perawatan perangkat computer.

Proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti peraturan yang berlaku, peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah. Biaya lainnya jika seluruh komponen telah terpenuhi pendanaannya dari BOS, penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah.

- 1) Pramuka kelas 4 dan 5 dilakukan sabtu pagi,
- 2) Bahasa Inggris kelas 1 dan 2 seminggu 1 jam
- 3) dilakukan seminggu 2 jam seni lukis,
- 4) Kaligrafi dan drumband

Fasilitas-fasilitas SD Joglo 76 Surakarta, adalah: Toilet, kantin dan koperasi, perpustakaan, mushola, lapangan, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dan ruang computer.

Sasaran program BOS adalah

semua sekolah SD di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan: a. SD/SDLB: Rp 800.000,-peserta didik/tahun, sekolah setingkat SD dan SMP dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 akan diberikan dana BOS sebanyak 60 peserta didik.

1. Proses Pembelajaran Sebagai Implementasi Penggunaan dana BOS

Berdasarkan hasil pelaksanaan observasi yang telah, perlu kiranya menjelaskan hal-hal mengenai proses pembelajaran dan aktifitas yang dilakukan oleh para guru pada siswa siswi di SD Negeri Joglo No.76 Surakarta dalam mengimplementasikan dana BOS adalah sebagai berikut:

- a. Keterampilan Membuka Pelajaran
- b. Keterampilan Bertanya
- c. Keterampilan Memberi Penguatan
- d. Keterampilan Menyajikan Materi pembelajaran

- e. Keterampilan mengadakan variasi mengajar, keterampilan mengelola kelas, keterampilan membimbing diskusi kelompok, keterampilan menutup pelajaran

Dalam jangka pendek, melalui penelitian ini akan membantu masyarakat/ komite sekolah dalam upaya sosialisasi program sekolah dasar (SD) Joglo Kadipiro Banjarsari Surakarta, agar tingkat partisipasi dalam turut serta memikirkan kemajuan sekolah bisa optimal bukan hanya menjadi tanggung jawab guru dan kepala sekolah di SD tersebut. Untuk jangka panjang adalah terus memahami proses pendidikan dan terus berpartisipasi terhadap penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran serta aktif dalam semua kegiatan yang dilakukan di SD untuk kemajuan para puteranya dan kemajuan SD Joglo Kadipiro Banjarsari Surakarta.

2. Maksud, tujuan, peran, dan fungsi Komite Sekolah

Maksud dibentuknya Komite Sekolah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan

kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat.

Tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung-jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan/sekolah. Oleh

karena itu, pembentukan Komite Sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Peran Komite Sekolah adalah:

- a. Sebagai lembaga pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Sebagai lembaga pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Sebagai lembaga pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Sebagai lembaga mediator (*mediator agency*) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Fungsi Komite Sekolah Untuk menjalankan peran yang telah disebutkan di muka, Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :

Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Melakukan kerjasama dengan masyarakat

(Perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia industri (DUDI)) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat

3. Partisipasi Komite Sekolah / masyarakat dalam Pengelolaan Dana BOS.

Partisipasi Komite Sekolah/ masyarakat dalam Pengelolaan Dana BOS khususnya di SD Joglo Kadipira, dalam keanggotaan pada komite/orang tua siswa yang memiliki heterogenitas latar belakang berbeda, peserta didiknya yang berbeda, dalam proses pembelajaran memiliki fasilitas sekolah sarana dan prasarana yang didukung dengan BOS dan partisipasi komite sekolah.

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk sosialisasi program sekolah melalui partisipasi komite dan masyarakat/orang tua

siswa. Selain itu manfaat yang lain adalah untuk mengetahui pengelolaan dana BOS yang berkaitan dengan program SD Joglo Kadipiro kecamatan Banjarsari kota Surakarta, sehingga melalui program sekolah dan partisipasi komite/masyarakat tersebut orang tua atau pendidik mampu menghantarkan peningkatan pendidikan dasar SD yang lebih berkualitas.

4. **Aktivitas/peran Komite Sekolah**

Perencanaan, penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana BOS, peran dan kewenangan komite sekolah dalam hal penyusunan dan penetapan RAPBS serta memberi dukungan dalam financial khususnya dalam penggalian dana dari wali siswa atau masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Perencanaan, penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana BOS, peran dan kewenangan komite sekolah dalam hal penyusunan dan penetapan RAPBS serta memberi dukungan dalam financial khususnya dalam penggalian dana dari wali siswa atau masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan

5. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat khususnya para orang tua wali murid SD Joglo Kadipira Surakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan komite sekolah adalah sebagai berikut: a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*), b. Pendukung (*supporting agency*), c. Pengontrol (*controlling agency*), d. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Peran dan fungsi Komite sekolah: (Pasal 196): a. peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, b. menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional, c. memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan

pendidikan, d. dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, d. menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah, e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Peneliti berpendapat bahwa tanpa bermaksud menyeragamkan terhadap seluruh komite sekolah yang ada, namun demikian satu hal yang harus sama adalah menumbuhkan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan pendidikan di setiap satuan pendidikan, sesuai dengan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Dengan peran dan fungsinya komite sekolah berpengaruh positif terhadap laju

D. KESIMPULAN

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan untuk mewujudkan data tentang tingkat partisipasi masyarakat/komite sekolah terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri Joglo Kadipiro Banjarsari Surakarta tahun ajaran 2015/2016.
- b. Manfaat yang lain adalah untuk memberikan masukan/laporan penelitian untuk mendapatkan rekomendasi oleh Dewan Pendidikan Kota Surakarta (DPKS) guna “Mengetahui Optimalisasi Tingkat Partisipasi Masyarakat/Komite Sekolah Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Joglo Kadipiro Banjarsari Surakarta.

E. SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi Komite Sekolah masih perlu mendapatkan pendampingan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai komite sekolah, Kesimpulan: perlunya optimalisasi peran komite sekolah pada SD Joglo Kadipira Surakarta, menghadirkan pembinaan team ahli, melalui Observasi, FGD (*Focus Group Discussion*), Wawancara, Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016

Dokumentasi, secara *purposive sampling* Hasil dari kesimpulan ini peneliti menyarankan, agar penelitian ini benar-benar bisa dimanfaatkan bagi semua pihak khususnya bagi lembaga pendidikan SD Negeri Joglo Kadipiro Banjarsari Surakarta, dan juga pada lembaga pendidikan umumnya, maka perlu ditindak lanjuti penelitian tahap berikutnya sampai menghasilkan berbagai variasi tinjauan tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Joglo Kadipiro Banjarsari Surakarta dengan manajemen yang tertata rapid an terprogram dengan jelas, serta dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, 2006, *Strategic Manajemen For Educational Management*, Bandung: Alfabeta.
- Borg, Walter R dan Gall, Meredith D. 1983. *Educational Research: An Introduction*. New York: Longman.
- Husaini Usman, 2006, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Irwan, *Landasan Membangun Karakter Bangsa*. Artikel pendidikan, Januari 2010.

- Moleong, Lexy, 1998, *Metodologi Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari, 2007, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siti Supeni, 2011, *Kepemimpinan Sekolah Berbasis Budaya Jawa*, Yogyakarta: Elmatara.
-, 2012, *Évaluasi Nilai Kepemimpinan Budaya Jawa Dalam Pandangan Dan Perilaku Kepala Sekolah Dasar*. Jurnal Terakreditasi Nasional No. 64a DIKTI/Kep/2010. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan UNY. Vol.1, No.2, Agustus 2012.
-, 2014, *Strategi pengembangan Model Pembelajaran Melalui Melalui Tembang Dolanan Jawa Sebagai Penguatan Nilai-nilai Pendidikan Karakter Pada Siswa SD Bumi 2. NO. 205 Laweyan Surakarta*. Jurnal: EKSPLOKASI-LPPM UNISRI Ska ISSN 0853-7054. VoL. XXVIII.
-, 2014. *Kontribusi Kompetensi Guru dan Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Mutu Kegiatan Belajar Mengajar di SD Kanisius Surakarta*. Jurnal: ISSN:2442-6350. Jurnal Profesi Pendidik. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Jawa Tengah.
- Sudarwan Danim, 2006, *Visi Baru manajemen Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Program Pascasarjana UPI dan PT Remaja Rosdakarya.